

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA
PADA BADAN PENGELOLA PERBATASAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**ANTONIUS NGGANGGA, S.Sos., M.M¹, KASIMIR SENIN, S.E., M.M²
Dosen Akuntansi STIE Oemathonis Kupang**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Tingkat Efektivitas Pengelolaan Anggaran Belanja pada Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Data yang digunakan adalah data kuantitatif yang terdiri dari anggaran belanja dan realisasi belanja selama tahun 2015-2018 dan data kualitatif yang berupa struktur organisasi dan uraian tugas. Analisis data dengan efektifitas untuk masing-masing belanja serta menghitung rata-rata dan pertumbuhan selama 4 tahun (2015-2018).

Data menunjukan bahwa pengelolaan anggaran belanja Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT tahun 2015-2018 "Tidak Efektif" karena rentang skornya kurang dari 100 % (<100%) yaitu belanja pegawai pada belanja tidak langsung sebesar 98,07%, belanja pegawai pada belanja langsung sebesar 96,14%, belanja barang/jasa sebesar 94,69%, belanja modal sebesar 97,09%..

Dari hasil analisis data tersebut maka disarankan kepada Kantor Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur agar pengelolaan anggaran diusahakan harus terealisasi sesuai anggaran.

Kata Kunci : Efektivitas Pengelolaan Anggaran Belanja

PENDAHULUAN

Anggaran merupakan tulang punggung penyelenggara pemerintahan. Anggaran memiliki peran penting sebagai alat untuk mencapai target dan sasaran yang ingin dicapai.

Anggaran pada Pengelola Perbatasan Provinsi NTT bersumber dari APBD. Jenis belanja pada Kantor Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT dibagi atas beberapa kelompok belanja langsung dan kelompok belanja tidak langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang

dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari : belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal, sedangkan belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yaitu belanja pegawai. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai, dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.

Tabel 1.1
Rencana Anggaran Belanja Dan Realisasi Anggaran Belanja
Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2015-2018

Tahun	Rencana Anggaran Belanja (Rp)	Realisas Anggaran Belanja (Rp)
2015	6.045.389.100	5.853.112.550
2016	6.467.540.000	6.305.850.613
2017	6.819.289.000	6.637.195.824
2018	6.426.861.000	6.162.001.753

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran BPP Provinsi NTT

Berdasarkan tabel 1.1 di atas menunjukkan target anggaran pada tahun 2018-2017 mengalami kenaikan, sedangkan tahun 2018 mengalami penurunan yaitu pada tahun 2015 anggaran sebesar Rp 6.045.389.100, tahun 2016 anggaran meningkat sebesar Rp 6.467.540.000, tahun 2017 anggaran meningkat lagi sebesar Rp 6.819.289.000 dan tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp 6.426.861.000. Selisih anggaran tahun 2015-2016 sebesar Rp 422.150.900 atau 93,47% tahun 2016-2017 selisih anggaran sebesar Rp 351.749.000 atau 94,84 tahun 2017,2018 selisih anggaran sebesar Rp 392.422.000 atau 10,61%. Realisasi yang dicapai oleh kantor Badan Pengelola perbatasan provinsi NTT untuk tahun anggaran 2015-2017 mengalami kenaikan, sedangkan tahun 2018 mengalami penurunan yaitu tahun 2015 jumlah realisasi sebesar Rp5.853.112.550 tahun 2016 anggaran realisasi meningkat sebesar Rp 6.305.850.613, dan pada tahun 2017 anggaran realisasi meningkat lagi sebesar Rp 6.637.195.824, sedangkan tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp 6.162.001.753.

Data diatas menunjukkan bahwa anggaran dan realisasi anggaran pada Kantor Badan pengelola perbatasan Provinsi NTT dari tahun 2015-2017 mengalami kenaikan sedangkan tahun 2018 mengalami penurunan. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Anggaran Belanja pada kantor Badan Pengelola perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur selama tahun anggaran 2015-2018.

TINJAUAN TEORITAS

Anggaran

Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai pernyataan menyangkut penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang.

Undang-undang Republik Indonesia No 17 tahun 2003 anggaran merupakan Alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi Sebagai instrument kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan Negara.

Anggaran menurut Mahsun (2006:145) adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter.

Ciri-Ciri Anggaran

Anggaran memiliki beberapa ciri khusus yang membedakan dengan sekedar rencana (Rusdianto,2006).

1. Dinyatakan dalam satuan moneter penulisan dalam satuan moneter tersebut dapat juga didukung oleh satuan kuantitatif lain, misalnya unit.
2. Umumnya mencakup kurun waktu satu tahun bukan berarti anggaran tidak dapat disusun untuk kurun waktu lebih pendek, tiga bulanan misalnya atau untuk kurun waktu di dalam penyusunan anggaran akan berfungsi untuk memberikan batasan rencana kerja tersebut.
3. Mengandung komitmen manajemen anggaran harus disertai dengan upaya pihak manajemen dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai apa yang telah ditetapkan. Usulan anggaran disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi dari pelaksana anggaran.
4. Jika terjadi penyimpangan/varians didalam pelaksanaannya,harus dianalisis sebab terjadinya penyimpangan tersebut. Karena,tanpa ada analisis yang lebih mendalam tentang penyimpangan tersebut maka potensi untuk terulang lagi di masa yang akan datang menjadi besar. Tujuan analisis penyimpangan tersebut adalah untuk

mencari penyebab penyimpangan, supaya tidak terulang lagi di masa mendatang dan agar penyusunan anggaran dikemudian hari menjadi lebih relevan dengan situasi yang ada.

Tujuan Anggaran

Tujuan disusunnya anggaran, antara lain:

1. Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana.
2. Mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan merinci jenis sumber dan yang dicari maupun jenis investasi dana, sehingga dapat mempermudah pengawasan, merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal.
3. Menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran menjadi lebih jelas dan nyata terlihat.
4. Menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan.

Macam-macam anggaran anggaran dapat dikelompokkan dari berbagai sudut pandang berikut ini (Nafirin, 2000):

1. Menurut dasar penyusunan, anggaran terdiri dari:
 - a. Anggaran variabel, yaitu anggaran yang disusun berdasarkan interval (kisar) kapasitas (aktivitas) tertentu dan pada intinya merupakan suatu seri anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat-tingkat aktivitas (kegiatan) yang berbeda.
 - b. Anggaran tetap, yaitu anggaran yang disusun berdasarkan suatu tingkat kapasitas tertentu.
 - c. Anggaran periodik, adalah anggaran yang disusun untuk satu periode tertentu, pada umumnya periodenya satu tahun yang disusun setiap akhir periode anggaran.
2. Menurut jangka waktunya, anggaran terdiri dari:
 - a. Anggaran jangka pendek (anggaran taktis), adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu paling lama satu tahun. Anggaran untuk keperluan modal merupakan anggaran jangka pendek.
 - b. Anggaran jangka panjang (anggaran strategis), adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu lebih dari satu tahun.

- a. Menurut bidangnya, anggaran terdiri dari anggaran operasional dan anggaran keuangan. Kedua anggaran ini bila dipadukan disebut "anggaran induk (master budget). Anggaran induk yang mengkonsolidasikan rencana keseluruhan perusahaan untuk jangka pendek, biasanya disusun atas dasar tahunan. Anggaran tahunan dipecah lagi menjadi anggaran triwulan dan anggaran triwulan dipecah lagi menjadi anggaran bulan.

2.1.4 Fungsi Anggaran

Menurut Rochmansjah (2010:98) dalam buku *Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah* memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

1. Anggaran sebagai alat perencanaan, yang antara digunakan untuk:
 - a) Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan.
 - b) Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya
 - c) Mengalokasi sumber-sumber ekonomi pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun.
 - d) Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.
2. Anggaran sebagai alat pengendalian, yang antara digunakan untuk:
 - a) Mengendalikan efisiensi pengeluaran
 - b) Membatasi kekuasaan atau kewenangan pemerintah daerah
 - c) Mencegah adanya overspending, underspending dan salah sasaran dalam mengalokasi anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas.
 - d) Memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan

- operasional program atau kegiatan pemerintah daerah.
3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberian fasilitas, dorongan dan koordinasi kegiatan ekonomi masyarakat sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi.
 4. Anggaran sebagai alat politik digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut.
 5. Anggaran sebagai koordinasi antar unit kerja dalam organisasi pemerintah daerah yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi.

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Rochmansjah (2010:99) struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah terdiri dari pendapatan daerah, belanja Daerah dan Pembiayaan.

1. Pendapatan daerah

Pendapatan daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang di pisahkan serta lain PAD yang sah.
- b. Dana Perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.
- c. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak pernah dipisahkan

2. Belanja daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi beban daerah.

3. Pembiayaan daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya

Pengertian pengelolaan

Kata ‘‘pengelolaan’’ dapat disamakan dengan manajemen yang berarti pula peraturan atau pengurusan. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang

dilakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Pengertian Belanja

Menurut peraturan pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010, belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh perbayarannya kembali oleh pemerintah.

Menurut permendagri Nomor 13 Tahun 2006, belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Jenis-jenis belanja

Belanja pada Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari:

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undang.

2. Barang Modal

Barang Modal adalah pengeluaran yang digunakan, dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap yang memberi manfaat lebih dari satu tahun periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan pemerintah. Seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan.

3. Barang/Jasa

Barang/Jasa adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk pengeluaran pembelian barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari satu tahun. Seperti makan minum, alat tulis, kantor, langganan daya dan jasa.

Pengertian Efektivitas

Sesuai Permendagri No. 13 tahun 2006, efektivitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil (*output-outcome*). *Outcome* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Efektivitas yang dimaksudkan dalam penelitian adalah sejauh mana Pengelolaan Anggaran Pada Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur merealisasi anggaran belanja

Menurut Mardiasmo (2009:132) efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil

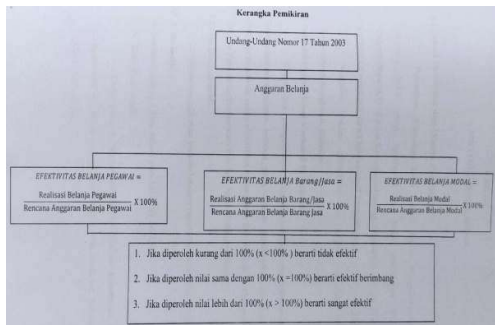
guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Indikator efektifitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak dari keluaran program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja sesuatu unit organisasi.

Kerangka Pemikiran

Pengukuran efektifitas bertujuan untuk mengetahui kemampuan pengelola anggaran dan menggambarkan suatu tingkat efektifitas di dalam pengelolaan keuangan pada Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT.

Sebagai alur berpikir dalam penelitian ini maka model kerangka pemikirannya dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian dan Operasional Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah variable Efektivitas Pengelolaan Anggaran Belanja.

Defenisi Operasional Variabel Penelitian

Efektivitas pengelolaan anggaran belanja merupakan tingkatan pengelolaan anggaran belanja yang diukur berdasarkan rasio efektifitas belanja pegawai, rasio efektifitas barang/jasa dan belanja modal pada Kantor Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Jenis Data

A. Menurut sifatnya data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Kuantitatif

Data yang berupa angka-angka. Dalam penelitian ini data kuantitatif terdiri dari anggaran belanja dan realisasi belanja selama tahun 2015-2018.

b. Data Kualitatif

Data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk penjelasan dan informasi dari bidang keuangan berupa penjelasan singkat mengenai tugas dan fungsi bagian keuangan Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT.

B. Menurut Sumbernya

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh Peneliti dari Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT yang selanjutnya diolah lebih lanjut, seperti laporan realisasi anggaran selama tahun 2015-2018.

b. Data Sekunder

Adalah data yang sudah diolah dan diperoleh Peneliti seperti laporan keuangan, struktur organisasi dan uraian tugas.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan kasubag keuangan dan staf yang berkaitan dengan masalah yang diteliti guna mendapatkan data anggaran belanja dan realisasi belanja.

b Dokumen

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan Anggaran dan Realisasi Anggaran pada Kantor Badan Pengelola.

Teknik Analisis Data

Menghitung efektifitas belanja pegawai, efektifitas belanja barang/jasa, dan efektifitas belanja modal setiap tahun kedalam rumus sebagai berikut:

1. Menghitung Rencana Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2015-2018
 - a. Efektivitas Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2015-2018

$\frac{\text{Rencana Anggaran Belanja Pegawai}}{\text{Realisasi Belanja Pegawai}} \times 100\%$
 b. Efektivitas Belanja Barang dan Jasa Tahun anggaran 2015-2018

$\frac{\text{Rencana Anggaran Barang/Jasa}}{\text{Realisasi Belanja Barang}} \times 100\%$
 c. Efektivitas Belanja Modal Tahun Anggaran 2015-2018

$\frac{\text{Rencana Anggaran Belanja Modal}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja Modal}} \times 100\%$

2. Menghitung Efektivitas Belanja Tahun Anggaran 2015-2018

Efektivitas Belanja Pegawai Tahun Anggaran

$\frac{\text{Rencana Anggaran Belanja Pegawai}}{\text{Realisasi Belanja Pegawai}} \times 100\%$

Efektivitas Belanja Barang dan Jasa
 $\frac{\text{Rencana Anggaran Barang/Jasa}}{\text{Realisasi Belanja Barang}} \times 100\%$

Efektivitas Belanja Modal
 $\frac{\text{Rencana Anggaran Belanja Modal}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja Modal}} \times 100\%$

3. Menginterpretasi efektivitas dengan kriteria

- Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x < 100%) berarti tidak efektif
- Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x=100%) berarti efektivitas berimbang
- Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x > 100%) berarti efektif

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menghitung Rencana Anggaran dan Realisasi Anggaran Kantor Badan Pengelola Provinsi NTT

Dalam rangka pelaksanaan tugas, Badan Pengelola Perbatasan memperoleh anggaran dari APBD berupa anggaran belanja daerah yang tertuang dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang terlihat dalam table berikut ini:

Pada perhitungan rencana anggaran dan realisasi anggaran Badan Pengelola perbatasan provinsi Nusa Tenggara Timur selama tahun 2015-2018, efektivitas pengelola anggaran belanja yang tertera pada table

Rencana Anggaran Belanja Dan Realisasi Anggaran Belanja Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2018

Tahun	Rencana Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Anggaran Belanja (Rp)
2015	6.045.389.100	5.853.112.550
2016	6.467.540.000	6.305.850.613
2017	6.819.289.000	6.637.195.824
2018	6.426.861.000	6.162.001.753

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran BPP Provinsi NTT

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan target anggaran pada tahun 2015-2017 mengalami kenaikan, sedangkan tahun 2018 mengalami penurunan yaitu pada tahun 2015 anggaran sebesar Rp 6.045.389.100, tahun 2016 anggaran meningkat sebesar Rp 6.467.540.000, tahun 2017 anggaran meningkat lagi sebesar Rp 6.819.289.000 dan tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp 6.426.861.000. Selisih anggaran tahun 2015-2016 sebesar Rp 422.150.900 atau 93,47% tahun 2016-2017 selisih anggaran sebesar Rp 351.749.000 atau

94,84 tahun 2017,2018 selisih anggaran sebesar Rp 392.422.000 atau 10,61%.

Menghitung Efektivitas Belanja Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Laporan realisasi anggaran belanja adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai realisasi belanja langsung dan tidak langsung, belanja barang jasa dan belanja modal yang masing-masing

diperbandingkan dengan anggrannya dalam satu periode.

Pada perhitungan laporan realisasi belanja Badan Pengelola perbatasan provinsi Nusa Tenggara Timur selama

tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, efektivitas pengelola anggaran belanja yang tertera pada table .

Tabel
Hasil Analisis Efektivitas Belanja
Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2018

JENIS BELANJA	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	
BELANJA TIDAK LANGSUNG:					
BELANJA PEGAWAI					
Anggaran	3.776.400.000	4.274.455.000	4.172.085.000	4.121.212.000	16.344.152.000
Realisasi	3.790.506.593	4.236.946.613	4.058.411.036	3.943.575.353	16.029.439.595
Efektivitas	100,37%	99,12%	97,28%	95,69%	98,07%
Kesimpulan	Tidak Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif
BELANJA LANGSUNG:					
BELANJA PEGAWAI					
Anggaran	160.131.000	142.655.000	169.690.000	306.445.000	778.911.000
Realisasi	149.360.000	139.655.000	167.930.000	291.975.000	748.920.000
Efektivitas	93,27%	97,90%	98,97%	95,28%	96,14%
Kesimpulan	Tidak efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif
BELANJA BARANG/JASA					
Anggaran	2.023.734.100	1.992.655.000	2.388.901.000	1.996.384.000	8.404.674.100
Realisasi	1.828.666.949	1.873.364.162	2.326.571.088	1.826.451.400	7.955.053.599
Efektivitas	90,36%	94,01%	97,39%	91,50%	94,62%
Kesimpulan	Tidak Efektif	Tidak Efektif	Tidak efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif
BELANJA MODAL					
Anggaran	85.124.000	57.775.000	88.073.000	-	231.522.000
Realisasi	84.579.317	55.883.000	84.333.700	-	224.796.017
Efektivitas	99,36%	96,73%	95,10%	-	97,09%
Kesimpulan	Tidak Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif

Sumber: Data olahan Peneliti

Sumber: Data olahan Peneliti

Pembahasan

Menginterpretasi Efektivitas dengan Kriteria Pengelolaan Rencana Anggaran dan Realisasi Anggaran Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan hasil perhitungan efektifitas pada table 4.2 menunjukkan bagaimana Kantor Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Timur dalam mengelola anggaran belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal selama tahun 2015-2018 tidak efektif karena rentang skornya dibawah 100% yaitu belanja pegawai pada belanja tidak langsung sebesar 98,07%, belanja pegawai pada belanja langsung sebesar 96,14%, belanja barang/jasa sebesar 94,65%, efektivitas belanja barang modal 97,09% .

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang digambarkan bab sebelumnya, menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran pada Badan Pengelola perbatasan provinsi NTT selama priode

anggaran 2015-2018 dalam kategori “**Tidak Efektif**” karena rentang skornya kurang dari 100% (<100%) yaitu belanja pegawai pada belanja tidak langsung sebesar 98,07%, belanja pegawai pada belanja langsung sebesar 96,14%, belanja barang/jasa sebesar 94,69%, belanja modal sebesar 97,09%.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka, Peneliti menyarankan bahwa:

1. Bagi kantor Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Diharapkan dapat meningkatkan tingkat efektivitas untuk belanja pegawai, belanja barang/ jasa dan belanja modal selama 4 tahun.
2. Bagi Peneliti lain
Diharapkan melakukan penelitian lanjutan untuk mengukur tingkatan efektivitas anggaran belanja pada tahun-tahun berikutnya guna mendukung hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim Abdul (2001), *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit UUP AMP YKPN; Yogyakarta
- Marsun (2009); *Pengukuran kinerja Sektor Publik*, Penerbit BPFE; Yogyakarta
- Mardiasmo (2009); *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi; Yogyakarta
- M.Nafarin, 2002 *Penganggaran Perusahaan*, Edisi Pertama, Palembang Empat Jakarta
- Oktaviana S. Sanga (Skripsi,2018)
“*Efektivitas Penggunaan Anggaran Belanja Pada Kantor Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur*”
- Peraturan keuangan No 31 Tahun 2010 Tentang *Keuangan Negara*
- Rochmansjah (2010); *Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah*, Penerbit, Fokusmedia
- Rudianto, 2006, *Akuntansi Manajemen: Informasi untuk pengambilan keputusan Manajemen*, penerbit Grasindo, Jakarta
- Suparmoko (2008); *Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktik*, Penerbit BPFE; Yogyakarta
- Sugiyono (2015); *Metode Penelitian*, Penerbit; Alfabeta Bandung
- STIE OEmathonis (2019); *Pendoman Penulis Skripsi*